


Analisis Dan Evaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET.
Dalam rangka penataan organisasi guna peningkatan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan	-	<p>Materi muatan/substansi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun 2025 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pancasila; 2. UUD 1945; 3. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 4. Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; dan 5. Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan. 	<p>Materi muatan dalam Permenhub Nomor PM 4 Tahun 2025 telah mengacu dan memperhatikan pada beberapa Peraturan Menteri lainnya antara lain;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah; dan 2. Permenhub Nomor PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 	-	<p>Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud telah dinyatakan selesai harmonisasi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum melalui surat Nomor PPE.4.PP.02.04-98 tanggal 6 Februari 2025.</p>

Sekretaris Jenderal,

 Novie Riyanto R.
 NIP. 19661111 199503 1 001

